

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Manajemen Sumber Daya Manusia

Mondy dan Noe mendefinisikan manajemen sumber daya manusia sebagai pendayagunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan-tujuan suatu organisasi. Menurut Melayu S.P. Hasibuan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan organisasi, karyawan, dan masyarakat.¹³

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai tujuan organisasi serta masyarakat.¹⁴ Tujuan manajemen sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan dukungan sumber daya manusia guna meningkatkan efektivitas organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Pertumbuhann ekonomi nasional juga dipengaruhi oleh kualitas dari sumber daya manusia. Semakin profesional dan kompeten sumber daya manusia yang dimiliki suatu negara berarti semakin efektif dalam

¹³ Sri Larasati, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta, DEEPUBLISH, 2018), hal. 6

¹⁴ Edy Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 6

pengelolaan sumber daya alam yang ada di negaranya sehingga pendapatan ekonomi negara tersebut bisa maksimal.

Fungsi manajemen sumber daya manusia¹⁵:

a. Perencanaan

Kegiatan memperkirakan keadaan tenaga kerja agar sesuai kebutuhan perusahaan.

b. Pengorganisasian

Berkaitan dengan pengkoordinasian sumber daya yang dimiliki oleh organisasi.

c. Pengarahan

Mengarahkan karyawan supaya bekerja secara efektif dan efisien sesuai tujuan perusahaan.

d. Pengendalian

Yaitu upaya yang dilakukan untuk meyakinkan bahwa organisasi bergerak sesuai dengan arah yang telah ditetapkan dalam tujuan.

e. Pengembangan

Pengembangan kemampuan sumber daya manusia melalui pelatihan. Pelatihan sumber daya manusia dimaksudkan untuk memperoleh sumber daya manusia yang profesional dalam mengolah sumber daya yang berpotensi ekonomi agar bisa meningkatkan pendapatan daerah. Sasaran pelatihan:

- 1) Meningkatkan produktivitas kerja

¹⁵ *Ibid.*, hal. 9-11

- 2) Meningkatkan mutu kerja
- 3) Meningkatkan ketepatan kerja
- 4) Meningkatkan moral kerja
- 5) Menjaga kesehatan dan keselamatan
- 6) Menunjang pertumbuhan pribadi

2. Pengelolaan (Manajemen)

Secara etimologi manajemen berasal dari kata *to manage* yang berarti mengatur. menurut Haimann manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama.¹⁶ Menurut Manullang, manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penempatan karyawan, pemberian perintah, dan pengawasan terhadap sumber daya manusia dan alam, terutama sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.¹⁷

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya baik manusia maupun sumber daya alam untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Pengelolaan (manajemen) adalah suatu cara atau proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan agar berjalan efektif dan efisien.

¹⁶ Anang Firmansyah, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal. 3

¹⁷ John Suprihanto, *Manajemen*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014), hal. 4

Fungsi- fungsi pokok manajemen menurut George R. Terry adalah sebagai berikut¹⁸:

a. *Planning*

Kegiatan yang menentukan berbagai tujuan dan penyebab tindakan-tindakan selanjutnya.

b. *Organizing*

kegiatan membagi pekerjaan di antara anggota kelompok dan membuat ketentuan dalam hubungan-hubungan yang diperlukan.

c. *Actuating*

Kegiatan menggerakkan anggota-anggota kelompok untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas masing-masing.

d. *Controlling*

Kegiatan untuk menyesuaikan antara pelaksanaan dan rencana-rencana yang telah ditentukan

3. Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) efektivitas berasal dari kata efektif yaitu terjadinya suatu akibat atau efek yang dikehendaki dalam perbuatan yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹⁹ Pengertian efektivitas sering dikaitkan dengan pengertian efisien. Setiap pekerjaan yang efektif belum tentu efisien. Namun, jika efektivitas menekankan pada hasil yang

¹⁸ *Ibid.*, hal. 9-10

¹⁹ M. Ali Humaedi, *Etnografi Bencana: Menakar Peran Para Pemimpin Lokal dalam Pengurangan Resiko Bencana*, (Yogyakarta: PT LKIS Printing Cemerlang, 2016), hal. 41-43

dicapai, sedangkan pengertian efisien lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai dengan membandingkan antara *input* dan *output*.

Jadi, penggunaan istilah efektif adalah melakukan pekerjaan yang benar dan sesuai dengan cara yang tepat untuk mencapai suatu tujuan yang direncanakan. Sedangkan efisiensi adalah hasil dari usaha yang telah dicapai dan lebih besar dari usaha yang dilakukan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas dapat dikatakan sebagai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi dari dua sudut pandang. Sudut pandang pertama yaitu dari segi hasil maka tujuan atau akibat yang dikehendaki telah tercapai sesuai dengan yang ditentukan. Sudut pandang kedua dari segi usaha yang telah ditempuh atau dilaksanakan telah tercapai sesuai dengan yang ditentukan.

Efektivitas pada kesimpulannya dikatakan sebagai taraf tercapainya suatu tujuan tertentu, baik ditinjau dari segi hasil maupun segi usaha yang diukur dengan mutu, jumlah serta ketepatan waktu sesuai dengan prosedur dan ukuran-ukuran tertentu. Efektivitas berfokus pada hasil (*output*), program, atau kegiatan yang dinilai efektif, apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.²⁰ Efektivitas menggambarkan seluruh siklus *input*, proses dan *output* yang mengacu pada hasil guna daripada suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauh mana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai, serta ukuran

²⁰ *Ibid.*, hal. 44

berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan dan mencapai target-targetnya.

Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas merupakan gambaran tingkat keberhasilan atau keunggulan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan adanya keterkaitan antara nilai-nilai yang bervariasi.

Untuk mengukur efektivitas menurut Gibson dapat dilihat dari²¹:

a. Kepuasan kerja

Yaitu perasaan seseorang terhadap pekerjaannya, ia akan merasa puas dengan kesesuaian antara kemampuan, keterampilan dan harapan terhadap pekerjaannya.

b. Produktivitas

Produktivitas merefleksikan hubungan antara input dan output. Setiap instansi memiliki input dan output yang perlu disesuaikan dalam misi dan tujuan organisasi.

c. Efisiensi

Merupakan perbandingan beberapa aspek prestasi terhadap biaya untuk menghasilkan prestasi.

²¹ Mukhtar, *Efektivitas Pimpinan: Kepemimpinan Transformatif dan Komitmen Organisasi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hal. 30-31

d. Kemampuan beradaptasi

Adalah kemampuan sampai sejauh mana organisasi merespon perubahan internal maupun eksternal. Kemampuan beradaptasi dalam konteks ini merujuk pada kemampuan manajemen untuk merasakan perubahan dalam lingkungan dan perubahan yang ada pada organisasi sendiri.

e. Pengembangan

Mengukur kemampuan organisasi meningkatkan kapasitasnya untuk menghadapi tuntutan lingkungan. Usaha pengembangan ini biasanya dilakukan dengan cara pelatihan pada karyawan.

4. Pendekatan Terhadap Efektivitas

Pendekatan terhadap efektivitas dilakukan dengan acuan berbagai bagian yang berbeda dari lembaga, dimana lembaga mendapatkan *input* atau masukan berupa berbagai macam sumber dari lingkungannya. Menurut Daft efektivitas dapat dievaluasi dengan melihat beberapa hal yaitu: pencapaian sasaran, proses pelaksanaan program yang tercermin dalam perilaku organisasi ketika berinteraksi dengan lingkungan, kepuasan konstituen dalam lingkungan, kesehatan kondisi internal, dan penilaian subyektif seseorang pada organisasi.²²

a. Pendekatan sasaran goal (*Goal Approach*)

Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Pendekatan

²² Andreas Budiharjo, *Organisasi: Menuju Pencapaian Kinerja Optimum, Sintesis Teori untuk Mengungkap "Kotak Hitam" Organisasi*, (Jakarta: Prasetiya Mulya Publishing, 2011), hal. 19-20

dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan mengidentifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkatan keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut. Sasaran yang penting diperhatikan dalam pengukuran efektivitas dengan pendekatan ini adalah sasaran yang realistis untuk memberikan hasil maksimal berdasarkan sasaran resmi “*Official Goal*” dengan memperhatikan permasalahan yang ditimbulkannya, dengan memusatkan perhatian terhadap aspek *output* yaitu dengan mengukur keberhasilan program dalam mencapai tingkat *output* yang direncanakan. Dengan demikian, pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana organisasi atau lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai.

b. Pendekatan stakeholder

Pendekatan stakeholder menekankan pada kepuasan konstituen dalam suatu lingkungan. Yang termasuk dalam konstituen adalah pemasok, pelanggan, pemilik, karyawan, pemegang saham, masyarakat, pemerintah dan lain sebagainya.

c. Pendekatan sistem (*System Approach*)

Pendekatan sistem menekankan pada sasaran jangka panjang dengan mengindahkan interaksi antara organisasi dan lingkungannya. Jadi, penekanannya tidak pada hasil akhir saja.

d. Pendekatan proses internal

Pendekatan ini mengukur kesehatan internal organisasi.

e. Pendekatan nilai bersaing

Menekankan pada penilaian subyektif seseorang pada organisasinya. Pendekatan nilai bersaing sering digunakan organisasi dalam mengukur keefektifan organisasi.

5. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah didirikan BUMDesa antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diperoleh dari BUMDesa, maka hal tersebut akan merangsang setiap Pemerintah Desa memberikan “*goodwill*” dalam merespon pendirian BUMDesa.

Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa yang didirikan berdasarkan ketentuan UU No. 6 tahun 2014 tentang desa, PP No. 06 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN dan Permendesa PDTT NO. 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengawasan, pengelolaan dan pembubaran BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.²³

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya

²³ <http://www.dpr.go.id/> diakses pada 20/08/18 pukul 12:05

memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDesa merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). Selain itu BUMDesa juga berperan sebagai lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar.

Pendirian BUMDesa disepakati melalui musyawarah desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi tentang pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa meliputi: pendirian BUMDesa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat, organisasi pengelola BUMDesa, modal usaha BUMDesa, dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDesa. Hasil kesepakatan musyawarah desa menjadi pedoman bagi Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDesa.²⁴

BUMDesa sedapat mungkin dibangun atas semangat dari keinginan masyarakat dengan mengemban prinsip-prinsip kooperatif dan partisipatif, serta pengelolanya dilakukan secara profesional dan mandiri. Prinsip pengelolaan BUMDesa yaitu²⁵:

²⁴ Suharyono Soemarwoto, *Catatan Penting Ke-Indonesia-an Kita*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal. 22

²⁵ Kongres Pancasila IV: *Strategi Pelembagaan Nilai-Nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia*, (Yogyakarta:PSP UGM, 2012), hal. 334

a. Kooperatif

Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDesa harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangannya dan kelangsungan hidup usahanya.

b. Partisipatif

Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDesa harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDesa.

c. Emansipatif

Semua komponen yang terlibat harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.

d. Transparan

Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.

e. Akuntabel

Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.

f. Sustainabel

Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDesa.

Tujuan Pembentukan BUMDesa²⁶:

²⁶ *Ibid.*, hal. 334

- a. Menghindarkan anggota masyarakat desa dari pengaruh pemberian pinjaman uang dengan suku bunga tinggi yang merugikan masyarakat.
- b. Meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan lain yang sah.
- c. Memelihara dan meningkatkan adat kebiasaan gotong royong masyarakat, gemar menabung secara tertib, teratur, dan berkelanjutan.
- d. Mendorong tumbuh kembangnya kegiatan ekonomi masyarakat desa.
- e. Mendorong berkembangnya usaha sektor informal untuk dapat menyerap tenaga kerja masyarakat di desa.
- f. Meningkatkan kreativitas berwirausaha anggota masyarakat desa yang berpenghasilan rendah.
- g. Menjadi tulang punggung pertumbuhan perekonomian desa dan pemerataan pendapatan.

Perbedaan BUMDesa dan koperasi, kalau BUMDesa adalah lembaga yang dikelola oleh desa dan keuntungannya digunakan 100% untuk kepentingan desa, misalnya membangun atau memperbaiki infrastruktur pedesaan. Sedangkan koperasi keuntungannya dimiliki anggotanya 100% untuk kepentingan masyarakat. Pengelolaan BUMDesa hendaknya negara tetap mengontrol agar bisa lebih transparan dan tidak menjadi momonopoli kelompok tertentu. Sebab ada BUMDesa yang sukses

ternyata pengurusnya adalah anggota keluarga dan kerabat kepala desa sendiri.²⁷

6. Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan adalah suatu upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan, dan pengelolaan sumberdaya lokal yang dimiliki melalui kegiatan kolektif dan berjejaring sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial. Pemberdayaan masyarakat bukanlah sebuah proses jangka pendek, namun merupakan proses jangka panjang.²⁸ Sedangkan pemberdayaan ekonomi sendiri dimulai dari pemberdayaan masyarakat suatu daerah karena yang mengelola sumber daya alam yang ada di daerah tersebut adalah masyarakatnya sendiri.

Pemberdayaan masyarakat mengandung dua pengertian yaitu: memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain, dan usaha memberi kemampuan atau keberdayaan. Pihak lain yang dimaksud bukan hanya ditujukan pada seseorang, namun juga sekelompok orang. Pemberdayaan itu merupakan proses yang sifatnya menyeluruh yaitu suatu proses aktif antara motivator, fasilitas dan kelompok masyarakat yang perlu diberdayakan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, pemberian berbagai kemudahan, serta peluang

²⁷ Jemmy Setiawan, *Merah Putih Tergadai di Perbatasan*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), hal.112

²⁸ Ardito Bhinadi, *Penanggulangan Kemiskinan & Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), hal. 23

untuk mencapai akses sistem sumber daya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemberdayaan meliputi tiga hal yaitu pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*), dan terciptanya kemandirian. Konteks pemberdayaan terkandung unsur partisipasi yaitu bagaimana masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan, dan hak untuk menikmati hasil pembangunan.²⁹ Pemberdayaan ekonomi merupakan program orientasi pemberdayaan masyarakat secara penuh agar dapat terentaskan dari kemiskinan. Pemberdayaan ekonomi diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Pemberdayaan ekonomi adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar.³⁰

Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan berikut ini. *Pertama*, upaya itu harus terarah. Ini secara populer disebut pemihakan. Upaya ini ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan adanya program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya. *Kedua*, program ini harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Mengikutsertakan masyarakat yang akan dibantu

²⁹ *Ibid.*, hal. 25

³⁰ Muhammad Hasan, *Pembangunan ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal*, (Makasar: CV. Nur Lina, 2018), hal. 161

mempunyai beberapa tujuan, yakni agar bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan mengenali kemampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu, sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya. *Ketiga*, menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Pendekatan kelompok ini paling efektif dan dilihat dari penggunaan sumber daya juga lebih efisien.³¹

Pemberdayaan masyarakat tidak lepas dari upaya untuk mengentaskan kemiskinan, baik di pedesaan maupun perkotaan. Lambatnya pengentasan kemiskinan suatu daerah disebabkan oleh banyak faktor. Pengertian pemberdayaan masyarakat desa menurut UU No. 6 tahun 2014 tentang desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Chambers menyatakan bahwa pemberdayaan ekonomi merupakan sebuah konsep pembangunan ekonomi dan politik yang merangkum berbagai nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma pembangunan,

³¹ *Ibid.*, hal. 25

yakni bersifat “*people centered participatory, empowering, and sustainable*” (berpusat pada rakyat, partisipatoris, memberdayakan dan berkelanjutan). Konsep ini lebih luas dan hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses kemiskinan lebih lanjut. Dinyatakan pula bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat dituntut mampu menginternalisasikan nilai-nilai tadi ke dalam kelompok.³²

7. Masyarakat Desa

Masyarakat (*community*) adalah sekumpulan orang yang mendiami suatu tempat tertentu, yang terkait dalam suatu norma, nilai dan kebiasaan yang disepakati bersama oleh kelompok yang bersangkutan. Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup dimana sebagian besar individu interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Masyarakat merupakan istilah yang digunakan untuk menerangkan komunitas manusia yang tinggal bersama-sama dalam suatu wilayah.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui pemerintahan nasional berada di daerah kabupaten. Desa menurut UU No. 6 tahun 2014 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

³² Arief Hudiono, *Efektivitas Program BUMDesa dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa (Studi Kasus BUMDesa Arto Doyo Desa Samudra Kulon, Kecamatan Gumelar, Banyumas, (Purwokerto, Skripsi Tidak Diterbitkan, 2018), hal. 65-66*

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/ hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jadi, masyarakat desa adalah masyarakat yang menempati suatu daerah tertentu yang memiliki hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri dan masih menerapkan adat istiadat yang ada di dalam masyarakat dan masih kental dengan budaya yang turun temurun dari nenek moyang.³³ Berdasarkan pada tipologinya, masyarakat desa adalah masyarakat yang mendiami suatu desa.³⁴

B. Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai landasan bagi peneliti dalam melakukan penelitian selanjutnya.

Menurut penelitian Hudiono³⁵ yang bertujuan untuk mengetahui keefektifan kinerja pengelolaan program BUMDesa dalam rangka memberdayakan ekonomi masyarakat desa. Penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian ini adalah dekriptif-kualitatif, dimana peneliti mengumpulkan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Uji keabsahan data dengan triangulasi. Sampel sumber ditentukan secara *purpose sampling* yaitu ketua dan pengelola BUMDesa Arto Doyo, dan warga masyarakat Desa Samudra Kulon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

³³ <https://www.kompasiana.com/wahyuputri/54f954d1ae068b4ca1/pengertian-masyarakat-desa>, diakses pada 21/08/18 pukul 21:30

³⁴ Cirad, *Panduan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LDMH)*, (Yogyakarta: harapan Prima, 2008), hal. 13

³⁵ Arief Hudiono, *Efektivitas Program BUMDesa dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa (Studi Kasus BUMDesa Arto Doyo Desa Samudra Kulon, Kecamatan Gumelar, Banyumas*, (Purwokerto, Skripsi Tidak Diterbitkan, 2018), hal. 65-66

program pemberdayaan ekonomi masyarakat desa oleh BUMDesa Arto Doyo ada tiga, dan baru dua tahap perencanaan yaitu unit usaha pertanian, dan pengadaan peralatan konveksi. Dan yang terealisasi baru satu, yaitu unit usaha simpan pinjam. Untuk indikator efektivitas menggunakan teori dari Ni Wayan Budiani dan Ahmad Wito Subagyo dengan tujuh indikator efektivitas program yaitu, ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, pemantauan program, ketepatan penggunaan dana, pengembalian dana, pelatihan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator ketepatan sasaran program, dan pengembalian dana sudah efektif, sedangkan untuk kelima lainnya masih belum efektif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Hudiono adalah menilai efektivitas BUMDesa dalam memberdayakan ekonomi masyarakat desa. Metode penelitian sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian Hudiono dengan penelitian ini adalah penelitian ini mengevaluasi sejauh mana pengelolaan BUMDesa, sehingga dapat menyimpulkan dampak yang diberikan oleh BUMDesa dalam rangka memberdayakan masyarakat desa. Objek yang diteliti adalah BUMDesa Arto Doyo sedangkan yang akan diteliti adalah BUMDesa Makmur Abadi Kabupaten Blitar.

Menurut penelitian Masruri³⁶ yang bertujuan untuk mengetahui efektifitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) di Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan tahun 2010. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian

³⁶ Masruri, *Journal of Governance and Public Policy: Analisis Efektifitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP)*, Vol. 4, No. 2, tahun 2017, hal. 363

deskriptif. Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui teknik analisis dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil dari penelitian yang dilakukan tentang efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan di Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan menunjukkan bahwa telah bisa dikatakan efektif, meskipun masih banyak kekurangan dalam pelaksanaannya. Kekurangan tersebut yaitu pada faktor tenaga kerja, dimana jumlah tenaga kerja tidak full mengisi formasi yang ada, selain itu formasi yang ada tidak diisi oleh tenaga spesialis yang sesuai dengan bidangnya. Kaitannya dengan formasi yang tidak terisi semua, maka berimbas kepada tumpang tindihnya kewenangan. Selain faktor tersebut diatas, faktor waktu pelaksanaan juga menjadi kendala. Dimana waktu pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan aturan dan standar yang harus dipenuhi sehingga berimbas kepada seluruh rangkaian jadwal kegiatan yang harus dilaksanakan. Selain faktor penghambat diatas, tentunya terdapat juga faktor pendukung sehingga pelaksanaan program dapat berjalan. Faktor pendukung yang dimaksud adalah informasi dan fasilitas yang diberikan. Informasi yang dimaksud adalah berupa peraturan, edaran, petunjuk operasional dan penguatan kapasitas bagi fasilitator pendamping. Persamaan penelitian Masruri dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang efektivitas program pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat. Perbedaan penelitian Masruri dengan penelitian ini terletak pada pembahasan pada skripsi ini menjelaskan pemberdayaan ekonomi masyarakat

melalui BUMDesa sedangkan dalam penelitian terdahulu tidak melalui BUMDesa.

Menurut penelitian Hayat³⁷ yang bertujuan untuk mengetahui proses pengembangan pendapatan ekonomi melalui BUMDes di Desa Panjalu serta partisipasi masyarakat dalam pengembangan BUMDesa. Metode penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif jenis kualitatif-kuantitatif (*mix methodes*) yaitu menggambarkan beberapa penemuan data yang dirumuskan dalam bentuk fenomena sosial dan data statistik. Penulis mengambil data sampel dengan menggunakan *purposive sampling*. Berdasarkan kriteria yang penulis berikan maka sampel berjumlah 50 orang. Alat yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data adalah hasil dokumentasi, observasi, dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses pengelolaan BUMDesa dilakukan melalui unit usaha masyarakat, seperti pengelolaan pasar, pengelolaan unit usaha produktif rumah tangga dan unit jasa lainnya. Beberapa unit tersebut membuka kesempatan masyarakat untuk mendapat pekerjaan baru. BUMDesa mampu menjadi strategi yang efektif dalam memobilisasi potensi yang dimiliki desa dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Pendapatan masyarakat BUMDesa yang paling banyak adalah berumur 41-50 tahun (36%), berumur 51-60 tahun (30%), berumur 31-40 tahun (18%), berumur 20-30 tahun (12%) dan yang paling sedikit adalah yang berumur 61-70 tahun (4%). Ini menunjukkan bahwa responden yang bekerja dengan adanya

³⁷ Teten J. Hayat, *Jurnal Ekonomi Islam: Efektivitas Peran BUMDes Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat di Desa Panjalu*, Vol. 1, No. 1, tahun 2018, hal. 133

BUMDes masih berusia produktif. BUMDesa yang paling banyak adalah yang berpendidikan SMA (56%), berpendidikan SD (20%), berpendidikan SMP (16%) dan yang paling sedikit adalah yang tamatan Sarjana (8%). Persamaan penelitian Hayat dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang efektivitas peran BUMDesa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Perbedaan penelitian Hayat dengan penelitian ini adalah metode penelitian lapangan yang bersifat deskriptif jenis kualitatif-kuantitatif (mix methodes) sedangkan skripsi ini menggunakan kualitatif saja.

Menurut penelitian Andini³⁸ yang bertujuan untuk mengetahui konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat dari desa tertinggal menuju desa tidak tertinggal di Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati. Metode penelitian ini adalah kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Teknik analisis menggunakan teknik analisis interaktif menurut Miles dan Huberman. Membahas tentang upaya Pemerintah Desa Muktiharjo dalam menjadikan masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan, meningkatkan partisipasi masyarakat dan melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan, mendirikan koperasi simpan pinjam serta membangun sarana prasarana umum yang dibutuhkan masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa potensi ekonomi di Desa Muktiharjo adalah pertanian, perikanan, pariwisata dan unit kegiatan masyarakat (UKM). Pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten adalah sebagai perencana, fasilitator, pengawas dan evaluator. Pemeritah kecamatan sebagai fasilitator

³⁸ Uly Hikmah Andini, *Jurnal Administrasi Publik: Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dari Desa Tertinggal Menuju Desa Tidak Tertinggal*, Vol. 2, No. 12 tahun 2010, hal. 7-11

antara pemerintah kabupaten dan desa. Dan pemerintah desa meliputi menjadikan masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan, meningkatkan partisipasi masyarakat dan melakukan pemberdayaan seperti memberikan pelatihan/ pendidikan kepada masyarakat, mendirikan koperasi simpan pinjam serta membangun sarana dan prasarana umum yang dibutuhkan masyarakat. Faktor pendukung yang ada meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah, globalisasi dan kemajuan teknologi. Sedangkan faktor penghambatnya adalah terbatasnya modal, sarana dan prasarana serta partisipasi masyarakat yang rendah. Persamaan penelitian Andini dengan penelitian ini adalah dalam jurnal ini juga membahas cara yang dilakukan pemerintah dalam memberdayakan masyarakat desa. Perbedaan penelitian Andini dengan penelitian ini adalah dalam jurnal ini dibahas cara-cara dalam memberdayakan masyarakat desa bukan hanya melalui BUMDesa saja.

Menurut penelitian Purnamasari³⁹ dengan judul Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Berbasis Ekonomi Kerakyatan di Desa Warungbambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang. Metode penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, *display* data, dan penarikan kesimpulan. Dalam pencapaian tujuan, keberhasilan yang tercapai oleh suatu organisasi tergantung dari

³⁹ Hanny Purnamasari, *Jurnal Politikom Indonesia: Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) Berbasis Ekonomi Kerakyatan di Desa Warungbambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang*, Vol. 1 No. 2 tahun 2016, hal. 31-42

kemampuannya untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber daya yang langka dan berharga secara setepat mungkin dalam usahanya mengejar tujuan operasi dan kegiatannya. Dalam pengelolaan badan usaha milik desa berbasis kerakyatan masyarakat desa upaya mewujudkan pencapaian tujuan dalam organisasi maka masyarakat desa juga diperlukan sumber daya manusia masyarakat desa yang berkualitas mengerti dan pahami aturan-aturan dan manajemen pengelolaan, berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan sekretaris Desa Warungbambu Kecamatan Karawang Timur. Namun berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti melihat bahwa pencapaian tujuan dalam efektivitas pengelolaan BUMDesa berbasis ekonomi kerakyatan masih belum efektif dan efisien. Hal ini terlihat dari masyarakat desa kekurangan sumber daya manusia yang mampu menjalankan manajemen dan pengelolaan keuangan, masyarakat desa juga kurang memperoleh informasi tentang pembentukan BUMDesa. Dalam proses integrasi membutuhkan komunikasi secara akurat yang diterima oleh organisasi lainya karena harus ada kesamaan tujuan sehingga mampu membangun komunikasi dengan baik. Kegiatan BUMDesa sebagai kegiatan yang berawal dari inisiatif dari masyarakat desa untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa. Persamaan penelitian Purnamasari dengan penelitian ini adalah dalam jurnal ini membahas tentang pemberdayaan masyarakat melalui BUMDesa dan metode yang digunakan adalah kualitatif. Perbedaan penelitian Purnamasari dengan penelitian ini adalah dalam jurnal ini objek yang digunakan adalah

BUMDesa Warungbambu sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengambil objek BUMDes Makmur Abadi Kabupaten Blitar.

C. Kerangka Konseptual

Memperkuat perekonomian masyarakat merupakan tujuan yang diharapkan pemerintah agar pertumbuhan ekonomi negara dapat terlaksana. Salah satu cara yang dilakukan Pemerintah Desa untuk memperkuat ekonomi masyarakat desa dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa. Dengan didirikannya Badan Usaha Milik Desa diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

Dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat desa, Badan Usaha Milik Desa harus dikelola secara efektif agar tercapai tujuan yang sudah dibuat. Dalam menilai efektivitas pengelolaan perusahaan dapat menggunakan beberapa pendekatan diantaranya pendekatan *sasaran goals*, pendekatan *stakeholder*, pendekatan sistem, pendekatan proses internal, dan pendekatan nilai bersaing.

Pemberdayaan ekonomi merupakan program orientasi pemberdayaan masyarakat secara penuh agar dapat terentaskan dari kemiskinan. Pemberdayaan ekonomi diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar.

Masyarakat desa adalah masyarakat yang menempati suatu daerah tertentu yang memiliki hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri dan

masih menerapkan adat istiadat yang ada di dalam masyarakat dan masih kental dengan budaya yang turun temurun.

Kerangka konseptual dari penelitian ini dapat dilihat dari gambar di bawah ini:

Gambar 1.1 Kerangka Konseptual

